

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan mayoritas besar penduduknya menganut agama Islam yang telah berkembang pesat dengan banyak berdirinya pondok pesantren di seluruh negeri ini. Pondok pesantren adalah tempat pendidikan Islam dengan sistem asrama, dimana kiai merupakan figur sentral, masjid menjadi pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pembelajaran agama Islam yang di ajarkan oleh kiai yang diikuti santri sebagai aktivitas utamanya (IAI dan BI, 2018).

Menurut data kementrian agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia hingga sekarang mencapai 28.000 pondok pesantren yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Perkembangan pondok pesantren yang sangat pesat tersebut memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Namun demikian, di dalam pesantren sendiri banyak muncul stigma bahwa pesantren tempat perkecambahan radikalisme dan paling buruk stigma sarang pembiakan teroris, dikarenakan terjadinya beberapa pengeboman di Indonesia. Banyak juga kasus tentang pelecehan yang dilakukan oleh kiai atau pengurus terhadap santriwati dan juga kasus kekerasan antara santriwan.

Selain itu, tanpa di sadari kalau di banyak pesantren, keuangan bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang kerap timbul, yang mana sering menjadi kendala buat melaksanakan kegiatan pesantren. Seperti yang berkaitan dengan penganggaran, akuntansi, alokasi, penyusunan administrasi dan juga kebutuhan pengembangan pesantren ataupun dalam proses kegiatan sehari-hari pesantren. Karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan, banyak pesantren yang mempunyai sumber daya manusia juga alamnya yang tidak terorganisir dengan baik dan menyebabkan kegiatan pendidikan pesantren berjalan lambat (Sakti dan Hidayat, 2019).

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan dalam lingkup pendidikan luar sekolah yang dilembagakan yaitu Lembaga Pendidikan Keagamaan. Selama ini

pengembangan pondok pesantren di Indonesia hanya sebatas pada peningkatan fasilitas pendukung pendidikan, bukan pengembangan yang mengarah ke akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, perubahan sistem dan manajemen di dalam pondok pesantren harus dilakukan seiring perubahan zaman dan juga diperkuat dengan diresmikan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang mana bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan pondok pesantren itu sendiri.

Pondok Pesantren bisa juga digolongkan *Non Governmental Organization* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), LSM adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau sekelompok orang yang mana secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitasnya. selanjutnya Teegan dkk. (dalam Fikri, dkk. 2010) menyebutkan bahwa karakteristik yang membuat berbeda LSM dengan organisasi lain adalah dimana organisasi nirlaba yang bukan hanya mengumpulkan keuntungan saja dalam kegiatan di masyarakat. Maka pondok pesantren juga bisa disebut sebagai organisasi nirlaba.

Bank Indonesia bersama IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2018 meresmikan buku Pedoman Akuntansi Pesantren yang mana bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga Pondok Pesantren menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan menunjang kelancaran kegiatan di dalam Pondok Pesantren. Walaupun buku Pedoman Akuntansi Pesantren tidak mengikat dalam pembuatan laporan keuangan, buku tersebut mengharuskan Pondok Pesantren berbadan hukum berbentuk yayasan jika mau menerapkan buku Pedoman Akuntansi Pesantren.

Suatu permasalahan dalam membangun pondok pesantren untuk membuat masyarakat luas merasa ikut andil memiliki pondok pesantren tersebut sebenarnya bermula dari pribadi yang tidak memikirkan apa yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap pondok pesantren maka harus mempunyai visi dan misi dari pondok pesantren. Sehingga diperlukan sebuah mekanisme akuntabilitas yang terbuka untuk publik yang sesuai amanat undang-undang nomor 18 tahun 2019 pasal 2 tentang Pesantren

yang mengharuskan pondok pesantren menerapkan asas akuntabilitas dalam mengelola pondok pesantren.

Pertanggungjawaban terkadang dimaknai dengan kata *Responsibility* dan *Accountability*. Kedua dari kata tersebut berbeda, bahwa *responsibility* adalah wewenang yang diperintah oleh atasan kepada bawahannya untuk melakukan suatu kebijakan, pertanggungjawaban tersebut dipakai oleh instansi pemerintah. Sedangkan *Accountability* merupakan perwujudan kewajiban yang diberi kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan serta menerangkan realisasi wewenang yang didapatkan sesuai dengan tujuan organisasi. Libby dan Luft (dalam Silvia J. dan M. Ansar, 2011) menyimpulkan bahwa akuntabilitas sangat melekat dengan seseorang, seseorang yang menerapkan akuntabilitas tinggi pastinya akan mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas dilakukan oleh seseorang dan organisasi, bukan hanya melalui persyaratan pelaporan dan pengungkapan, tetapi melalui tanggung jawab mereka kepada publik juga, dalam hal kinerja dan nilai organisasi (Ebrahim, 2003). Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah perbuatan manusia di dalam suatu organisasi yang melaksanakan tujuan organisasi untuk masyarakat. Akuntabilitas mempunyai prinsip penting yang harus dilaksanakan pada hampir seluruh sektor baik itu publik, swasta, maupun masyarakat. Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sampai sekarang ini masih didominasi oleh rasionalisasi hubungan antara principal-agent (Ebrahim, 2003; Van Slyke, 2006) yang menunjukkan kalau agent sebagai pihak ketiga diberi tanggungjawab oleh principal untuk mengelola organisasi dan bertujuan untuk kepentingan principal. Konflik kepentingan akan terjadi akibat pemisahan ini yaitu antara principal dengan agent, karena mengutamakan kepentingan pribadi merupakan kecenderungan sifat manusia.

Transparansi dan rasa keadilan didalam setiap organisasi merupakan urgensi akuntabilitas yang harus dilakukan, dikarenakan kepercayaan dari donatur dan masyarakat akan tetap bertahan jika setiap organisasi menerapkan akuntabilitas (Randa, 2011:2). Oleh sebab itu, agar pihak pondok pesantren, donator, dan masyarakat Kerjasama nya tetap berkelanjutan, pemilik memerlukan suatu pengawasan yang dapat digunakan untuk melihat kinerja manajemen melalui laporan

kinerja berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan lain yang dilaporkan secara rutin. Pada pengertian yang berbeda, akuntabilitas adalah hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 2005), akan tetapi dalam kesehariannya di organisasi nirlaba tetap masih lemah (Brown, L. D., dan Moore, 2001).

Dari penjelasan diatas, akuntabilitas yang begitu pentingnya bagi Pondok Pesantren, yang mana banyak Pondok Pesantren yang berdiri di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Surabaya ini, seperti Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya (PPM KH). Peneliti sangat tertarik melakukan penelitian di Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya (PPM KH) dikarenakan PPM KH selalu berkembang dari sarana dan prasarana hingga pembangunan gedung baru dalam kurun waktu 10 tahun sejak diresmikan pertama kali. Selain itu, perbedaan dari pondok pesantren lainnya adalah santrinya yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di Surabaya.

Perkembangan PPM KH sendiri bermula dari tempat indekos mahasiswa lalu diubah menjadi griya mahasiswa dan pada akhirnya resmi diubah menjadi Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda (PPM KH) pada tahun 2009. Perkembangan PPM KH yang berkembang sangat cepat dalam hal pembangunan dengan berdiri 3 PPM KH ditempat berbeda di Surabaya. Pertama, PPM KH 1 yang sebagai pusatnya berada di jalan Nginden gang 3 No. 50 Surabaya. Kedua, pada tahun 2014 mendirikan PPM KH 2 lalu diresmikan pada tahun 2015 yang mana tempatnya berada di jalan SMEA Negeri 3 No. 4 Surabaya. Ketiga, pada tahun 2015 mendirikan lagi PPM KH 3 lalu diresmikan pada tahun 2017 yang tempatnya berada di Jalan Semampir Selatan II A No. 114 Surabaya.

## **1.2. Kesenjangan Penelitian**

Praktik akuntansi dan akuntabilitas masih dianggap sesuatu yang tidak umum pada lembaga keagamaan atau lembaga nirlaba. Walaupun tidak umum, penelitian pada gereja banyak di lakukan oleh beberapa peneliti akuntansi dengan meneliti terhadap praktik akuntansi pada organisasi keagamaan seperti gereja. (Simanjuntak dan Januarsi, 2011). Seperti yang dilakukan oleh peneliti (Randa, dkk. (2011) yang

mengikhtisarkan bahwa organisasi Gereja Katolik berdasarkan akuntabilitas spiritual memberikan arti pada perkumpulan gereja untuk menjaga hubungan vertikal dan horizontal. Rini, (2015) dalam temuannya mengikhtisarkan juga bahwa akuntabilitas dalam organisasi gereja tidak sekedar sebagai kebutuhan akan tetapi lebih pada jati diri gereja untuk membangun hubungan antara jemaat dan tuhan.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan organisasi keagamaan terhadap konsep akuntabilitas diterangkan melalui penelitian dengan obyek Masjid. Fitria (2017) mengikhtisarkan kerangka akuntabilitas adalah untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah SWT disusun dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas formal dan informal). Oleh sebab itu, timbal balik (*reciprocal ness*) dari dua bentuk akuntabilitas memimpin manusia sebagai khalifah Allah untuk memenuhinya akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Kesimpulannya bahwa manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Untuk meneliti tentang aspek akuntabilitas yang lebih luas, diperlukan setting organisasi yang berbeda-beda (Roberts dan Scapens, 1985). Penelitian pada organisasi keagamaan dengan Peran dan praktik akuntansi seperti gereja setidaknya lebih maju dibandingkan dengan penelitian akuntansi di organisasi keagamaan lainnya. Oleh sebab itu, kekurangan penelitian akuntansi pada organisasi pendidikan keagamaan Islam yaitu pondok pesantren perlu diisi, sebagai pusat tempat pengembangan ilmu agama dan kehidupan spiritual umat Islam, karena organisasi pondok pesantren jarang sekali menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul “Akuntabilitas Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya”.

### **1.3. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada uraian yang disajikan dalam latar belakang di atas, urgensi akuntabilitas bagi publik menjadi suatu kewajiban. Maka penelitian ini berusaha mengungkap akuntabilitas Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya (PPM KH). Dengan demikian, rumusan masalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi kasus ini adalah: Bagaimana akuntabilitas Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang akuntabilitas di Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya (PPM KH).

#### **1.5. Ringkasan Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan tentang obyek dan informan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

#### **1.6. Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk dan praktik akuntabilitas pada organisasi publik non pemerintah atau bisa disebut organisasi nirlaba khususnya di bidang pendidikan agama yaitu Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Huda Surabaya (PPM KH);
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang demi tercapainya sebuah organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik.

## **1.7. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang perlunya dilaksanakan penelitian ini. Latar belakang tersebut mengenai pondok pesantren dan permasalahannya sehingga diperlukannya akuntabilitas pada pondok pesantren. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diharapkan bermanfaat di masa datang bagi peneliti, akademisi, dan juga terdapat pemaparan sistematika penulisan skripsi secara garis besar.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi teori, konsep, dan argumentasi yang relevan dengan permasalahan dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang telah diperoleh. Disamping itu, bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Di samping itu, bab ini juga memaparkan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, obyek dan informan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

### **Bab 4 Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan dan membahas hasil penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Mahasiswa khoirul Huda Surabaya dan dimensi akuntabilitas yang meliputi : (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; (2) Akuntabilitas Kebijakan; (3) Akuntabilitas Program; (4) Akuntabilitas Proses; (5) Akuntabilitas Keuangan. Selanjutnya dihubungkan dengan jenis akuntabilitas yaitu secara vertikal dan horizontal. Di samping itu juga memaparkan hasil temuan-temuan

selama penelitian dan dari hasil temuan dapat menjelaskan akuntabilitas dalam perspektif Pondok Pesantren.

### **Bab 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pondok Pesantren Mahasiswa Khoirul Hudan Surabaya dan penelitian selanjutnya.